

Diskursus Sosial Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA) di Kabupaten Malang

Stakeholder Social Discourse in Natural Resource Conservation (UPSA) Efforts in Malang District

**Tatag Muttaqin¹, Musdzalifah Sukmawati¹, Imam Ade Putra Bala²,
dan Naresvara Nircela Pradipta¹**

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Malang, Kode Pos 65144, Indonesia

²Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas
email: tatag@umm.ac.id

Abstract

UPSA (The Natural Resources Conservation Effort is one of BPDAS Brantas Sampean's RHL (Forest and Land Rehabilitation) programs which are carried out in 3 places namely Pujon Hill, UB Forest and Wajak, Malang Regency. Collaboration between stakeholder is the main key to the succes of policy products and their sustainability. Discourse is present as a tool that is able to provide an explanation of sosial conditions. Aim of this research is how the perspective of stakeholder influences the follow-up action of the program. Data collection uses observation, interviews document analysis related to UPSA. Discourses analysis begins with the result of interviews that have been recorded and then transcribed into writing and data analysis by the Nvivo12 software. The result of the data re then explained descriptively. Our findings show that the perspective of each stakeholder towards the UPSA Program Influences land management. The Occurrence of domination of power, a sense of ownership and openness among stakeholders has the potential to create new conflicts.

Keywords : Social Discourse, Stakeholder, UPSA

Abstrak

UPSA (Usaha pelestarian Sumber Daya Alam) merupakan salah satu program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) BPDAS Brantas Sampean yang dilaksanakan di 3 tempat yaitu Pujon Hill, UB Forest dan Wajak. Kolaborasi antar *stakeholder* menjadi kunci utama keberhasilan dari produk kebijakan dan keberlanjutannya. Diskursus hadir sebagai alat yang mampu memberikan penjelasan kondisi sosial. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana perspektif *stakeholder* mempengaruhi tindakan lanjutan dari program tersebut. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan analisis dokumen terkait UPSA. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis diskursus sosial. Analisis diskursus di mulai dari hasil wawancara yang telah direkam lalu ditranskrip menjadi tulisan, dan analisis data dibantu *software Nvivo12*. Hasil data kemudian dijelaskan secara diskriptif. Temuan kami menunjukkan jika perspektif setiap *stakeholder* terhadap program UPSA mempengaruhi pengelolaan lahan. Terjadinya dominasi kekuasaan, rasa kepemilikan dan keterbukan antar *stakeholder* berpotensi menghadirkan konflik baru.

Kata kunci : Diskursus Sosial, Stakeholder, UPSA**PENDAHULUAN**

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali seringkali mengarah pada penurunan kualitas lingkungan. Hutan dapat terus lestari jika keberlanjutan secara ekologis dan ekonominya terjamin. Keberlanjutan ini membutuhkan partisipasi Masyarakat (Haji et al., 2020; Yahman & Setyagama, 2022), terutama yang tinggal langsung berbatasan dengan hutan (Nakita & Fatma, 2020).

Forest Resource Managemant (FSM) dianggap sebagai target kebijakan yang diinginkan untuk mencapai tujuan ekologi dan sosial ekonomi (Tebkew dan Atinkut, 2022; FAO, 2010). Paradigma baru ini dapat menghasilkan produk-produk kehutanan yang lebih beragam. Dengan adanya UPSA yang menggabungkan 2 kegiatan konservasi tanah dan air dapat mencapai keberlanjutan (BPDASHL Brantas Sampean, 2020a) Sistem penanamannya yang mengombinasikan *mix farming* atau tumpangsari pada penggunaan jenis tanaman tertentu (kelompok tanaman keras/kayu, MPTS/buah-buahan/tanaman unggul lokal, tanaman semusim dan rumput), dengan komposisi jenis-jenis yang menguntungkan dan memberikan hasil yang lebih baik dan memperhatikan agroklimat, biofisik lahan, dan minat masyarakat, namun tanaman semusim juga masih dilaksanakan sebagai selingan (BPDASHL Brantas Sampean, 2020b)

Kolaborasi dalam tata kelola lingkungan dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan manajemen dan tata kelola yang melibatkan berbagai *stakeholder*

(Nijamdeen et al., 2023). Tidak adanya kesadaran *stakeholder* secara alami dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program (Reed et al., 2009). Partisipasi dalam pengelolaan bersama menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pertanian (Ullah et al., 2022) dan kolaborasi yang buruk dari berbagai *stakeholder* dapat mengurangi efektivitasnya dan dapat menyebabkan konflik (Es'haghi, dan Karamidehkordi, 2023). Teknik partisipatif diakui secara luas sebagai hal yang penting dalam mengatasi tantangan kebijakan lingkungan pertanian dan pengambilan keputusan (Valujeva et al., 2023)

Fenomena sosial dalam kebijakan tata kelola lingkungan dapat dijelaskan menggunakan diskursus. Dryzek (1997) menggambarkan diskursus sebagai cara bersama untuk memahami dunia, memungkinkan stakeholder berkolaborasi dan menyatukan potongan-potongan informasi dalam catatan yang koheren (Hajer & Versteeg, 2005; Faiclough, 1989) berpendapat bahwa diskursus dan struktur sosial merupakan hubungan dua arah yang saling mempengaruhi satu sama lain. Diskursus penting bagi kekuasaan dan dalam mempertahankan kekuasaan itu sendiri. kekuatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan karena dapat mempengaruhi dan berkontribusi dalam perubahan sosial (Fauzan, 2013). Analisis diskursus falcault menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui interkasi, relasi atau jaringan dari relasi. Kekuasaan tidak berdiri di luar lingkaran relasi melainkan bermain di dalamnya (Animaydila, 2015).

Penelitian ini memfokuskan pada diskursus di ranah sosiologi dengan observasi langsung di lapang. Ranah sosiologi yang dimaksud adalah data primer yang diambil langsung di lapang dengan langsung mewawancarai informan yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini tidak hanya analisis teks-teks literatur dan penelitian-penelitian terdahulu (Anridho, 2017). Analisis diskursus merupakan suatu proses yang dapat memahami kondisi sosial (Kartodihardjo, 2017). Menggunakan analisis diskursus penelitian ini memperhatikan beberapa aspek misalnya; pandangan terhadap program UPSA, apakah program tersebut memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pelestarian sumberdaya alam, serta bagaimana program tersebut memengaruhi prespektif dan tindakan masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan 3 tempat yang berbeda dari bulan Desember 2022 sampai Agustus 2023. Pada 3 lokasi UPSA ini terdapat 2 lokasi yang berada dalam wilayah KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) yaitu UPSA Pujon yang berada di KHDTK Universitas Muhammadiyah Malang (Pujon Hill) dan UPSA Karangploso yang berada di KHDTK Universitas Brawajawa (UB Forest) sedangkan untuk UPSA Wajak berada di luar kawasan atau lahan milik pribadi (BPDASHL Brantas Sampean, 2020b).

Data yang digunakan ada 2 yaitu data sekunder dan data primer. Data

sekunder berasal dari laporan-laporan hasil kegiatan UPSA P0, P1, dan P2 oleh BPDASHL Brantas Sampean, Naskah rancangan UPSA, dan Peta Lahan UPSA. Sedangkan data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder*, wawancara direkam lalu transkrip menjadi tulisan. Data harus mencakup pandangan dan tindakan masyarakat terhadap program UPSA dan cara program tersebut memengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat dalam melestarikan sumberdaya alam. Tahap selanjutnya yaitu analisis dimulai dari penjabaran dimensi teks, lalu menjelaskan konteks sosial yang sedang terjadi (Muhassin, 2019). Pengumpulan data sendiri ada 3 yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan analisis dokumen.

Subjek penelitian ini yaitu seluruh representasi dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) di wilayah Pujon Hill UMM, UB Forest dan Wajak yaitu BPDASHL Brantas Sampean, Penyuluh Cabang Dinas Kehutanan wilayah Malang, Pengelola Pujon Hill, Pengelola UB Forest, KTH Pujon Hill UMM, KTH UB Forest, KTH Wajak. Badan Responden ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan penilaian khusus sedangkan (Nurdiani, 2014). Dalam penelitian ini, pertama menentukan kriteria-kriteria responden. Kedua, memilih *stakeholder* yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai informan utama atau informan yang memiliki banyak informasi. Menggunakan metode ini, responden yang berpotensi nantinya akan dihubungi. Kontak awal inilah responden awal akan memberikan

rekomendasi responden. Pengambilan data dilakukan dari bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 dengan responden (n=18, 4 dari Pengelola KHDTK, 9 dari Pesanggem/kelompok tani hutan, 3 dari penyuluh CDK/dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur, 2 dari BPDASHL Brantas

Sampean) menggunakan wawancara secara langsung. Semua responden dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam UPSA dan hasil rekomendasi dari *stakeholder*. Adapun lokasi tempat yaitu di UPSA Pujon Hill, UPSA UB Forest, dan UPSA Wajak.

Tabel 1. Lokasi UPSA di Wilayah Kerja BPDASHL Brantas Sampean

Kecamatan	Lokasi	Luas (Ha)
Pujon	Petak , Desa Bendosari	10
Karangploso	Blok Sumpersari, petak 85, Desa Tawang Argo	10
Wajak	Blok Pandanrejo, Desa Bambang	10

Tabel 2. Daftar Narasumber

No	Kode	Jabatan	Keterangan
1	An	Pengelola KHDTK UB Forest bagian lapang,	KHDTK UB Forest
2	Lu	Pesanggem UB Forest	KTH UB Forest
3	Ilu	Pesanggem UB Forest	KTH UB Forest
4	Iw	Pengelola KHDTK UB Forest bagian lapang	KHDTK UB Forest
5	Pi	Ketua KTH UB Forest	KTH UB Forest
6	Gi	Pesanggem UB Forest	KTH UB Forest
7	Ca	Direktur UB Forest	KHDTK UB Forest
8	He	Pengelola KHDTK Pujon Hill	KHDTK Pujon Hill UMM
9	Wo	Pesanggem Pujon Hill UMM	KTH Pujon Hill UMM
10	Ng	Pesanggem Pujon Hill UMM	KTH Pujon Hill UMM
11	Mu	Penyuluh CDK	Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur
12	Ag	Penyuluh CDK	Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur
13	Wa	Ketua Pesanggem Wajak	KTH Wajak
14	Bo	Pesanggem Wajak	KTH Wajak
15	Ar	Pesanggem Wajak	KTH Wajak
16	As	Petugas dari BPDASHL bagian Perencanaan	BPDASRH Brantas
17	Wi	Penyuluh CDK	Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur
18	Sw	Petugas dari BPDASHL bagian RHL	BPDASRH Brantas

HASIL DAN PEMBAHASAN Interaksi Sosial di Lahan UPSA

Hasil ini (gambar 1, gambar 2, gambar 3) didapatkan dari *word cloud* hasil analisis data transkrip wawancara dengan *stakeholder* yang terlibat dalam

progam UPSA. Kata yang dimunculkan adalah kata yang mempengaruhi pola interaksi antar *stakeholder*. Setiap lahan UPSA memiliki kasus yang berbeda seperti terjadinya dominasi aktor, rasa memiliki lahan, agroklimat, dan biofisik

lahan. Disini kami akan membahas secara menyeluruh dari setiap tiga lahan UPSA, bagaimana karakteristik, kepentingan *stakeholder*, dan kebutuhan petani mampu menimbulkan gesekan sosial serta mempengaruhi pengelolaan lahan.

Interaksi Sosial di Lahan UPSA Pujon Hill

Upsa Pujon terletak di Blok 43a dan 44, Desa Bendosari, kecamatan Pujon, Malang, Subdas Konto, DAS Brantas. Jenis tanah Andosol, dengan tekstur tanah lempung berpasir, jeluk tanah kurang > 90

cm dan tingkat kesuburan subur. Berada di ketinggian kurang lebih 1.100 sampai 1.200 MpdL dengan topografi berbukit dan curah hujan 1.600 sampai 2.000 mm/tahun. Jumlah KTH disana berjumlah 25 orang dan rata-rata mata pencaharian yaitu petani dan peternak susu sapi perah. Lahan Pujon Hill ini dulunya dikelola oleh Perhutani, sejak 2018 kawasan ini menjadi KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) dengan luas 75 ha dan dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Malang (BPDASHL Brantas Sampean, 2020d)



Gambar 1. Interaksi Sosial UPSA Pujon Hill

Gambar 1 dengan mentranskripsi data hasil wawancara dan laporan program UPSA yang dicoding menggunakan software NVIVO secara spesifik pengelompokan pada kasus yang sering terjadi di UPSA Pujon Hill. Saat pengelola KHDTK sebagai lokasi program UPSA berganti kebijakan yang didalamnya juga ikut berganti. Dari sistem kebijakan hingga fungsi lahan pun ikut berubah, yang awalnya untuk lahan produksi menjadi kawasan pendidikan dan produksi non-kayu. Menurut Brown dan Raymond (2014), konflik pada lahan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangannya kekuatan sosial, kurangnya pengaturan

kelembagaan yang jelas. Membentuk kerja sama antar *stakeholder* tentu membutuhkan waktu dan pendekatan-pendekatan yang tepat. Pengelola dituntut untuk mengetahui karakteristik KTH yang ada di Pujon Hill. Pentingnya pemahaman petani tentang ini memberikan dampak langkah selanjutnya oleh pengelola.

“ya memang masyarakat sudah, sudah tahu kalau masyarakat disini, ini punya umm, yang ngelolah sekarang UMM,” (narasumber no.8)

“kalau dari LHK atau perum perhutani sudah di respon lah, kita tidak bisa atau menolak atau gimana, itu dengan catatan kita ini kan ya punya pesanggem yang

garap disitu ya, permintaan kami, ehem, pokoknya pesanggem saya jangan ikut dikeluarkan, diajaklah bekerjasama dalam mengelolah kawasan tersebut,” (narasumber no. 10)

Pada pernyataan narasumber no. 8 dan no 10 menjelaskan bahwa petani telah mengetahui dengan jelas status lahan yang mereka garap dan pengelola yang baru. Kalimat *“kita tidak bisa menolak atau gimana,”* menunjukkan bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menolak pergantian pengelola. Kata *“Permintaan kami, ehem, pokoknya pesanggem saya jangan dikeluarkan, diajaklah bekerjasama dalam mengolah kawasan tersebut”* mengidentifikasi jika petani masih bergantung pada lahan. Mata pencaharian utama petani Pujon Hill yaitu peternakan sapi perah dan lahan pertanian dijadikan sebagai sampingan.

“Mudah kok sana dibilanginnya, gak kaku” (narasumber no.9)

“kalau gak setuju ya, sekarang inikan pengelolanya siapa, disini sudah mulai tahu lah, porsinya,” (narasumber no. 8).

Narasumber no. 9 menunjukkan bahwa karakteristik sifat petani Pujon Hill memiliki sifat terbuka dan mau bekerjasama dengan pihak pengelola. Hal ini dapat disebabkan mulai mengertinya status lahan yang digunakan oleh petani. Merujuk pernyataan He petani sudah paham dan tidak berani menentang pengelola. Disini pengelola KHDTK mendominasi kekuasaan.

“Kita tidak menjelekkkan masyarakat sendiri yaa, tapi kayaknya masyarakat itu kurang respond begitu yaa, kayaknya maunya semauanya sendiri, aturang yang

dibuat sama pujon hill kurang dipatuhi,” (narasumber no.10)

Kalimat “Masyarakat itu kurang respon,” menunjukkan jika hubungan yang telah terjalin baik ini mulai merenggang. Beberapa aturan mulai tidak dijalankan seperti sengaja membakar pohon, pergantian penggarap lahan. Selain itu, pengelola yang memiliki prinsip jika peraturan yang dibuat harus dijalankan, yang sifat yang memaksa. Dari pernyataan narasumber no. 8 *“Kalau gak setuju ya, sekarang inikan pengelolanya siapa”* diidentifikasi jika peraturan yang telah dibuat bersifat memaksa. Pengelola berharap dengan peraturan yang memaksa ini petani sengan melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Menilik dibalik latar belakang aktor Pujon Hill, pengelola merupakan akademisi yang memiliki peran untuk pemberdayaan di aras makro (membangun komunikasi politik dan jaringan organisasi lingkungan) dan di aras mikro (pembangunan di unit terkecil seperti tingkat desa), reformasi etika kerja lingkungan dan pengembangan penelitian pengimplementasian di lingkungan (Cahyadi, 2011) dan berdasarkan MENLHK dalam Pasal 23 Ayat 1 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan sebagai berikut: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan dan wisata alam (KLHK, 2018).

Memperbaiki hutan seperti sediakala adalah tujuan dari pengelola. Oleh karena itu peraturan yang dibuat memaksa guna mencegah kerusakan hutan oleh faktor

sosial. Untuk mencapai keberlanjutan hutan jangka panjang maka membutuhkan kolaborasi antar *stakeholder* lainnya. Ini dikuatkan oleh penelitian terdahulu Valujeva et al., (2023) menyebutkan bahwa, ketika suatu program baru dikenalkan terutama perubahan yang akan mempengaruhi stabilitas keuangan mereka, maka pendapat petani sangatlah penting.

Interaksi Sosial di Lahan UPSA UB Forest

Upsa UB Forest terletak di petak 85, Desa Tawang Argo, kecamatan Karang Ploso, Malang, Subdas Hulu Brantas, DAS Brantas. Jenis tanah Andosol, dengan tekstur tanah lempung berpasir, jeluk tanah kurang > 90 cm dan tingkat kesuburan subur. Berada di ketinggian kurang lebih 1.200 sampai 1.800 MpdL dengan topografi berbukit dan curah hujan 1.800 sampai 2.000 mm/tahun. Jumlah KTH disana berjumlah 25 orang dan rata-rata pencaharian yaitu petani dan peternak sapi daging. Lahan UB Forest ini dulunya dikelola oleh Perhutani, sejak 2015 kawasan ini menjadi KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) dengan luas 545 ha dan dikelola oleh Universitas Brawijaya (BPDASHL Brantas Sampean, 2020c).

“Kalau orang yang gak paham kelompok ini, gak tahu program-programnya, gak tahu apa yang ditanam, ya sering mencurigai kami korupsi hemmm, setelah saya

jelaskan dan semua ada suratnya mereka bingung juga,” (narasumber no 5)

“Jadi kan magersari sana ingin melepaskan kawasan, itu kan kalau pelepasannya sih tidak, tidak terbuka, secara diam diam gitu loo, jadi tidak memberi tahu kalau misalnya mereka sudah lama mengurus pelepasan kawasan, kan kalau masalah kayak gini kan harus ada keterbukaan, tapi itu tidak ada,” (narasumber no 1)

Konflik sosial yang tengah terjadi di UB Forest sangatlah kompleks. Lamanya petani menggarap lahan menimbulkan rasa kepemilikan lahan tersebut menjadi kuat. Selain itu, baik dari KTH atau pengelola tidak saling percaya. Pernyataan Pi menjelaskan jika KTH sering dicurigai menggelapkan dana program. Hal ini dapat merenggangkan hubungan antar *stakeholder* dan menimbulkan konflik, seperti tidak dipatuhinya peraturan. Temuan yang kami dapatkan saat observasi ke lapang, kami menjumpai petani yang melakukan pembakaran pohon pinus guna mengurangi tegakan.

Sesuai dengan peraturan KHDTK, pemanfaatan, penggunaan pohon dilarang Hidayat et al., (2020) menyatakan bahwa, implementasi kebijakan dapat berhasil jika fungsi lembaga yang dibangun, berjalannya aturan yang ditetapkan. Tetapi pada UB Forest tidak berjalan dengan baik. Ini ditegaskan oleh Pernyataan An bahwa KTH tidak pernah terbuka terhadap pengelola.



Gambar 2. Pinus yang sengaja dibakar, ditemukan di Petak UPSA UB Forest

“banyak LSM yang masuk sini, yang sering kress nya itu permintaan dari KTHnya sering berlawanan dengan fungsi hutan, contohnya kan di UB forest itu kan tidak boleh menebang pohon, Cuma dibuat untuk penelitian, pelatihan, terus ekowisata, pokoknya selain non kayu,” (narasumber no 1).

“ini sudah sangat dinamis yang artinnnya punya akses kemana-mana. Kadang-kadang malah lebih over, hati-hati dengan KTH. Over apa? Ada lsm masuk, semua ini sudah bisa diakomodir oleh yang namanya kth. Kadang kelurahan gak dilaporin kegiatannya KTH itu seperti apa? Jadi istilahnya kita mendidik dulu, jadi gak mesti kita ini mendidik anak pitik po mendidik anak macan kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan sebenarnya kth ini juga manut, tapi karena tekanan eh saat informasi itu sangat besar, adanya tora macam-macam artinya bahwa kth juga menerima aksesibilitas dari luar, ya tidak hanya kemudian ya dan akhirnya

informasinya tidak benar misalnya tanah boleh disertifikatkan, dan macam macam itu kan yo temen ta” (narasumber no 1)

Pernyataan narasumber no 1 menunjukkan bahwa masuknya LSM tidak selamanya berdampak positif. Keinginan KTH yang sering berlawanan dengan fungsi KHDTK membuat pengelola enggan menuruti dan berimbas dengan tidak terbukanya petani dengan pengelola. Petani lebih mempercayai pihak luar seperti LSM yang lebih mengerti keinginan mereka. hal ini dapat disebabkan karena agenda utama LSM Kehutanan yaitu Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan (Riva et al., 2013). Pernyataan Ca *“Over apa? Ada lsm masuk, semua ini sudah bisa diakomodir oleh yang namanya kth,” “juga menerima aksesibilitas dari luar,”* Kami menemukan bahwa KTH yang sudah dimasuki LSM dapat mendominasi kekuasaan. KTH UB Forest yang dibina oleh LSM dan pengelola ini dapat menggunakan informasi dengan tepat

sehingga dapat menekan kepentingan *stakeholder* lainnya dan akhirnya mendominasi.

Interaksi Sosial di Lahan UPSA Wajak

Upsa wajak terletak di Desa Bambang, kecamatan Wajak, Malang, Subdas Lesti, DAS Brantas. Jenis tanah Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol Kelabu, dengan tekstur tanah butiran kasar, jeluk tanah kurang > 90 cm dan tingkat kesuburan sedang. Berada di ketinggian kurang lebih 1.100 sampai 1.200 MpdI dengan topografi landai dan curah hujan 1.627 mm/tahun. Jumlah KTH disana berjumlah 25 orang dan rata-rata pencaharian yaitu petani dan peternak susu (BPDASHL Brantas Sampean, 2020e).

“molahne kita yang kayak gini mbak, tidak pernah menolak kunjungan siapapun, baik mahasiswa, dosen atau masyarakat, kita selalu terbuka, jadi alhamdulillah kita saring pengalaman saja,” (narasumber no 16)

Penjelasan narasumber no 16 jika para petani Wajak membuka diri terhadap orang-orang yang masuk membawa kepentingan. Keterbukaan ini membuat semua program yang ditawarkan kepada petani berjalan baik. Sebelum masuknya UPSA, Kawasan ini pernah pada kawasan tersebut mendapatkan program CCCD (*Cross Cutting Capacity Development Project*), sebuah program internasional untuk penanaman pohon dan terbukti berhasil dijalankan dengan baik. Dampak dari keterbukaan sifat petani Wajak banyak program yang ditawarkan dan inovasi-inovasi baru yang didapatkan dari hasil penelitian seperti pupuk fermentasi,

kompos blok. Kompos blok yang dibuat petani dan peneliti mampu mengurangi presentase kegagalan tumbuh tanaman dan meminimalisir serangan uret.

“lah lek ganti kelompok seng anyar sido mek perang tok, gak sido nyambut gawe,” (narasumber no 16)

“wong kita dulu pas sudah jadi, kita diajak sama cdk ke UB Forest, istilahnya disuruh ngomong-ngomong sama petani sana, UPSA kayak gimana,” (narasumber no 15)

Narasumber no 15 dan 16 menjelaskan bahwa sistem kelembagaan, KTH Wajak sudah berjalan dengan baik meski tergolong baru. Hal ini dapat dikarenakan kelembagaan KTH sama dengan LMDH, petani menakutkan jika dibentuk kelompok baru akan memicu konflik baru dan program akan terkendala. Selain itu, KTH wajak juga mengambil peran penting berjalannya UPSA di UB Forest. Lewat bantuan petani, petani UB Forest menerima Program UPSA. Menurut Valujeva et al (2023), menjelaskan jika untuk mencapai kerjasama sebagian petani menghargai pertukaran informasi dengan petani lain, memperkuat jaringan *horizontal* di antara petani dapat lebih meningkatkan penyebaran informasi tentang praktik pengelolaan lahan multi fungsi. Kawasan yang rata-rata bekas tambang membuat petani Wajak memilih berjalan beriringan dengan pihak luar dan beranggapan bahwa akan menguntungkan membawa pihak luar masuk terutama akademisi yang akan membawa pemecahan masalah dan inovasi-inovasi baru.



Gambar 4. Interaksi Sosial UPSA Wajak

Analisis Prespektif Stakeholder Terhadap UPSA dan Tindakan Keberlanjutan Program

Demi keberlanjutan suatu program maka perlu mengetahui prespektif *stakeholder* yang ada, karena berimbas pada tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ini akan membantu mengetahui *stakeholder* mana yang memiliki pengaruh besar dalam mengagalkan suatu program (gambar 5). Dalam analisis ini semua *stakeholder* dari pemerintah, pengelola KHDTK, KTH, dan penyuluh CDK (Cabang Dinas Kehutanan) Wilayah Malang diteliti. Penelitian terdahulu Nijamdeen et al. (2023) menyebutkan, jika semua prespektif semua *stakeholder* berdampak pada bagaimana program akan dikelola. Dari 5 *stakeholder* (KHDTK UB, KHDTK UMM, KTH, Dinas Kehutanan, BPDASRH Brantas), masing-masing membawa kepentingan yang hampir sama.

BPDASHL Brantas Sampean

Dari hasil analisis gambar 8 didapatkan jika kepentingan BPDASHL Brantas

Sampean dalam berjalannya UPSA, hasil menunjukkan jika unsur tuntutan dalam menjalankan program lebih besar dari unsur lainnya. Tuntutan disini artinya bahwa program yang dijalankan atas perintah dari KLHK.

“gak mbak, UPSA itu sebenarnya kana da program pekerjaan dari pusat, di wilayah pusat, diantaranya seperti sudah ada, Cuma sampai sini dikelola, dicari lokasinya, kita hanya yo hanya menjalankan program dari pusat saja,” (narasumber no 16)

Penjelasan tersebut dapat diartikan jika pemerintah hanya menjalankan tugas karena faktor perintah dari pusat. Selain menjadi sumber pendanaan, BPDASHL Brantas Sampean juga menjalankan tugasnya seperti melakukan kontroling dari P0 (Penanaman Awal), P1 (Penanaman Tahun Pertama), dan P2 (Penanaman Tahun Kedua), dan pengawasan berjalannya program.



Gambar 1. Hasil Prespektif, Respond dan Tindakan Stakeholder terkait Progam UPSA

Unsur lainnya yaitu untuk konservasi lahan, pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UPSA masyarakat terkhususnya disekitar hutan dapat ambil peran dalam menjaga lingkungan dan masyarakat hutan lebih paham bagaimana cara mengolah lahan yang bijak. Unsur selanjutnya yaitu ekonomi, tanaman UPSA yang sudah jadi atau berbuah akan menjadi sumber penghasilan tetap dan secara biaya petani tidak mengeluarkan biaya besar, karena dari P0, P1 dan P2, dana ditanggung oleh pemerintah. Manfaat lainnya yaitu lahan kritis di wilayah DAS Brantas dapat berkurang dan dapat progam yang sudah jadi dapat menjadi percontohan bagi wilayah atau petani lainnya terkhususnya di wilayah kritis. Dengan asumsi jika tanaman buah lebih menguntungkan daripada tanaman semusim.

“Kalau misalnya rusak karena masyarakat sendiri agak repot ya, aspek social seperti itu, eh disini itu Cuma yang penting, P1 dan P2 nya sudah terselesaikan dan hasil akhirnya setelah P2, kalua misalkan itu rusak itu kena penyakit, kita sudah lepas, jadi begitu, baru kalau ada pengajuan lagi, pengajuan kegiatan lagi, disana, tapi kalau misalnya satu tempat yang sama,

kayaknya gak mungkin, minimal harus beda desa (narasumber no 16)

“iya, jadi itu sudah dari awalkan perjanjian kan, perjanjian akan semua disini kan baru, hanya membantu bidang pendanaan saja, saya punya kegiatan UPSA tolong dicarikan lokasi, misalnya di malang gitu aja, kita ketemu petani, dari awal petani bisa ndak bertanggung jawab dengan kegiatan, kan itu penmanfataannya untuk kelompok sendiri kan? Bukan untuk kita kan, jadi kalau UPSA ya harus sendiri, apa ya istilahnya, sebetulnya jika P2 itu telah selesai ya dari kelompok sendiri kalau ingin memperbaiki seperti itu, atau cari CSR lah kasarannya begitu (narasumber no 18)

Pernyataan narasumber no 17 *“Cuma yang penting, P1 dan P2 nya sudah terselesaikan dan hasil akhirnya setelah P2, kalua misalkan itu rusak itu kena penyakit, kita sudah lepas,”* dan pernyataan Sw *“jadi itu sudah dari awalkan perjanjian kan, perjanjian akan semua disini kan baru, hanya membantu bidang pendanaan saja,”* mengidentifikasi jika progam yang dijalankan BPDASHL Brantas Sempaan semata hanya tuntutan, tidak ada tindak

lanjut. Kurang tegasnya pemerintah dalam program menyebabkan hilangnya pengaruh.

Pengelola KHDTK

Pengelola tentunya ingin kawasan yang mereka jaga tetap lestari dan berkelanjutan. Banyak cara yang telah dilakukan pengelola untuk mencapai tujuan ini seperti membuat peraturan, mengikuti program pemerintah, menerima program pemberdayaan masyarakat dari luar seperti KKN. Namun semua itu kembali kepada petani, apakah semua itu dapat ditangkap dan dijalankan dengan baik oleh petani. Hasil analisis dibuktikan jika unsur konservasi lahan pada 5 *stakeholder*, hasil pengelolah lebih besar dari yang lainnya. Tidak hanya mementingkan konservasi, pengelola juga memikirkan kondisi petani, tidak mungkin petani bersedia mengganti tanaman semusim menjadi tanaman buah, yang jika dilihat jarak menanam dengan hasil panen membutuhkan waktu lama. Mengatasi hal ini sambil menunggu panen tanaman UPSA, pengelola memperbolehkan tanaman semusim tetap ditanam dengan catatan tanaman UPSA tidak boleh dirusak dan setelah hasil panen terlihat petani akan sadar jika tanaman buah lebih menguntungkan daripada tanaman semusim.

“Kata pak sumatri, kita-kita ini masalah lapangan lebih pintar (narasumber no 16)

“Soalnya lebih sering ngalamin, berpengalaman, bertahun-tahun di lapang” (narasumber no 14)

“soalnya kalau sistemnya sekolah itu yang jadi gurunya itu tanamannya,” (narasumber no 2)

Pernyataan Ar, Wa, dan Lu menjelaskan jika petani merasa jika soal

lapangan mereka lebih pintar dibandingkan dengan pengelola karena mereka sudah di lahan bertahun-tahun. Mekanisme pendekatan yang digunakan pengelola untuk bisa sampai masuk ke masyarakat tidak boleh agresif dan menggurui. Pengelola harus mengetahui karakteristik dan keinginan seperti apa diinginkan oleh petani. Melalui pendekatan secara humanis dan *horizontal* dapat menjadi strategi bijak untuk bisa berbaur dengan petani dan mendapatkan hasil *win-win solution* antar *stakeholder*. Dengan cara memberi fasilitas baik berupa transfer pengetahuan (pelatihan praktis) atau sosialisasi dampak praktik tidak hanya berimbas kepada petani tapi juga generasi selanjutnya. Dengan begitu pengelola dapat mengambil hati masyarakat dan menghindari kesalahpahaman dan kebingungan.

KTH (Kelompok Tani Hutan)

KTH adalah tokoh utama dalam keberhasilan suatu program keberlanjutan hutan. Tanpa adanya peran KTH maka tidak mungkin suatu program dapat berjalan dengan baik. Hasil analisis prespektif KTH terhadap UPSA menunjukkan hasil dominan adalah unsur ekonomi.

“kemarin inikan kayak gini mbak, bagus jeruknya kayak gitu, sama bapaknya jeruknya dipotong sama bapak, karena apa, jeruk gak laku dan terus gak bisa nanami apa-apa,” (narasumber no 3)

“jadi saya kurangi,” (narasumber no 2)

Pernyataan Ilu dan Lu menunjukkan jika hasil pertanian yang tidak menguntungkan maka petani berpotensi kembali ke tanaman semusim. Jadi dapat diketahui jika petani tertarik pada suatu program karena melihat keuntungan yang ada. Respon yang diberikan petani yakni

baik, walau sebagian petani ada yang tidak memperdulikan adanya UPSA. Menurut Ajidin (2020), Naik turunnya harga dapat disebabkan oleh tidak meratanya banyaknya produk dengan permintaan pasar. produksi sayur atau buah yang masih terpusat dapat menyebabkan harga komoditas berflutuasi. Sifat sayuran dan buah yang mudah rusak penyebab petani tidak dapat mengontrol harga. Petani terpaksa menjual hasil panen dengan cepat karena takut tanamannya rusak dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

“Bibit beli sendiri dan dikasih itukan beda, bedanya itu bukan dari kualitas ya, tapi dari mana bibit itu didapatkan, kalau beli sendirikan bakal dirawat betul-betul, tapi kalau diberi cuma-cuma ya beda lagi” (narasumber no 10)

“Ada yang ngambil di bawa pulang gak ditanam tanam akhirnya mati juga ada,” (narasumber no 10)

“Memang baik, tapi maksud kami gini mbak, memang kita seperti bangun rumah lah mbak, nek bangun rumah kan ancen mengebu-gebu tapi belaii, kadang ini kan bocor, lah merawat gitu lo, juga seperti itu, tanam juga, sudah kita tanamkan sudah kita anukan, tapi kadang kadang untuk,” (narasumber no 14)

“Yo memberikan pupuk itu lo mbak, kadang kadang ares-aresen, tapi yang sama liat di kopi itu kan baik,” (narasumber no 15)

“Tergantung pemiliknya,” (narasumber no 16)

Pernyataan narasumber no 11 menjelaskan penggunaan bibit yang terjadi di kalangan petani. Bibit yang dibeli sendiri dengan yang diberi gratis memiliki perlakuan yang berbeda bahkan ada bibit yang diberikan tidak ditanam-tanam

hingga akhirnya mati. Hanya sebagian petani yang melakukan hal tersebut. Sebagian lain petani merawat tanaman dengan baik karena tahu betul keuntungan tanaman buah, sesuai dengan pernyataan narasumber no 14, 15, dan 16.

Penyuluh CDK (Cabang Dinas Kehutanan) Wilayah Malang

Tugas penyuluh sendiri dalam program UPSA adalah untuk mendampingi masyarakat tentang bagaimana kegiatan itu berlangsung sesuai dengan kaidah konservasi dan transfer teknologi. Transfer teknologi adalah petani diberikan teknologi-teknologi yang ada dan memiliki dampak. Memahami masyarakat terkait kaidah konservasi dan menghasilkan pendapatan. Membantu secara administrasi seperti bidang yang membutuhkan dokumen dokumen. Menjadi penengah atau pemersatu antar *stakeholder* baik terdapat konflik atau tidak.

Hasil analisis penyuluh terhadap prespektif UPSA menunjukkan unsur konservasi lahan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sama besarnya, dan unsur tuntutan dalam menjalankan tugas sangat kecil. Dari hasil wawancara dengan penyuluh didapatkan bahwa pengelolaan dana di UPSA berjalan baik, di UPSA UB Forest sisa pengelolaan dana dibelikan untuk bibit lemon dan UPSA Wajak sisa pengelolaan digunakan untuk lebah trigona. Hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan petani dan menimalisir petani beralih ke tanaman sayuran.

“Gab gab itu pasti ada, dan ini saya kira ini ini, perlu proses, kalau saya melihat itu, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, dijadikan masalah tapi

perlu dipecahkan, kalau kita di masyarakat kita tidak boleh mencari permasalahan, tapi ini adalah potensi yang harus kita pecahkan dan itu memang saya sebagai eh penyambung sebagai kelembagaan antara masyarakat dengan ini, tapi saya membatasi diri,” (narasumber no 17)

Narasumber no 17 menjelaskan bahwa masalah-masalah sosial yang tengah terjadi antar *stakeholder* dan potensi-potensi konflik sosial dan lahan harus ditemukan pemecahan masalahnya. Menurut Widhianthini et al. (2016), kebijakan kolaboratif yang benar adalah cara membangun jaringan baru aktor atau *stakeholder* dan perannya dapat berjalan secara maksimal. Tujuan dari kebijakan kolaboratif adalah mencapai keefektifan dan efisiensi dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mencegah terjadinya konflik yang menghadirkan ketidaksesuaian.

KESIMPULAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder*, dengan kerjasama yang baik dan menyelaraskan semua kepentingan dapat meningkatkan keberhasilan suatu keberlanjutan hutan. Dengan mengetahui tanggungjawab masing-masing antar *stakeholder* kolaborasi dalam menimalisir kegagalan. Analisis ini memberikan wawasan terkait interaksi antar *stakeholder* dan menggambarkan peran *stakeholder*.

Hasil penelitian dalam kasus BPDASHL Brantas Sampean adalah program yang dijalankan sebagian besar didasarkan atas tuntutan dari pusat. Program yang telah usai dapat terus dilakukan kontrol dan dijaga

kelestariannya. Kami mendapatkan bahwa sikap pemerintah hanya mengacu pada laporan yang telah dibuat. Jika masalah seperti kerusakan yang ada terjadi setelah laporan selesai atau serah terima maka pemerintah tidak mengambil tindakan secara tegas.

Pada kasus pengelola pujon Hill, pengelola dapat memainkan perannya baik dan mendominasi suatu kepentingan. Lain halnya dengan UB Forest, pengelola terdominasi oleh KTH yang dapat disebabkan tidak dapat mengontrol tekanan informasi dari luar. Berbeda dari kasus Pujon Hill dan UB Forest, UPSA Wajak berada diluar kawasan mereka tidak terikat peraturan konservasi, karena lahan yang digunakan adalah pribadi. Para petani memilih bekerjasama dengan semua pihak luar karena beranggapan bahwa pihak luar akan membantu mereka dalam pemecahan masalah dan membuat mereka inovasi-inovasi yang dapat mengangkat perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, R. B. P. (2020). *Penyebab Naik Turunnya Harga Sayur dan Buah*. Agro Indutrie.
- Animaydila, R. (2015). *Konstruksi Persepsi Hubungan Pertemanan Lawan Jenis Yang Ditampilkan Pada Tokoh Bryce Losky Dan Juli Baker Dalam Film Flipped*.
- Anridho, C. (2017). *Diskursus Pendidikan Tinggi Pada Keluarga Etnis Tinghoa Dan Etnis Madura Di Kota Surabaya* (Issue 1).
- BPDASHL Brantas Sampean. (2020a). *Laporan Bimbingan Teknis Kegiatan UP UPSA Tahun 2020 /*

- I.
- BPDASHL Brantas Sampean. (2020b). *Laporan Pembutan*.
- BPDASHL Brantas Sampean. (2020c). *Naskah Rancangan UPSA 10 Ha UB*.
- BPDASHL Brantas Sampean. (2020d). *Naskah Rancangan UPSA 10 Ha UMM*.
- BPDASHL Brantas Sampean. (2020e). *Naskah Rancangan UPSA 10 HA Wajak*.
- Brown, G., & Raymond, C. M. (2014). Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping. *Landscape and Urban Planning*, 30, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.11.007>
- Cahyadi, A. (2011). Peran Cendekiawan dalam Lingkungan Hidup. *Ani Cahyani*, 1–9.
- Es'haghi, S. R dan Karamidehkordi, E. (2023). Understanding the Stucture of Stakeholder - Projects Network in Endangered Lakes Restoration Programs using Social Network analysis. *Enviromental Science and Policy*, 140, 172–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.12.001>
- Fauzan, U. (2013). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough. *Pendidik*, 5(2), 209–217.
- Hajer, M., & Versteeg, W. (2005). A decade of discourse analysis of environmental politics: Achievements, challenges, perspectives. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 7(3), 175–184. <https://doi.org/10.1080/15239080500339646>
- Haji, L., Valizadeh, N., & Hayati, D. (2020). The role of local communities in sustainable land and forest management. In *Spatial Modeling in Forest Resources Management: Rural Livelihood and Sustainable Development* (pp. 473–503). Springer.
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus. In *Peraturan Perundangan* (Issue 15, pp. 1689–1699).
- Nakita, Clearestha, dan F. U. N. (2020). Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia. *Jurnal IUS Civile*, 5(3), 248–253.
- Nijamdeen, T. W. G. F. M., Ratsimbazafy. H. A., Kodikara. K. A. S., Nijamdeen, T. W. G. F. A., Thahira, T., Peruzzo, S., Guebas, F. D., dan Huge, J. (2023). Mangrove management in Sri Lanka and stakeholder collaboration : A social network perspective. *Journal of Environmental Management*, 330(July 2022), 1–18.

- <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117116>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Riva, W. F., Hutagaol, P., & Levang, P. (2013). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(1), 77–94. https://doi.org/10.29244/jurnal_mp.d.v5i1.24195
- Tebkew, M., & Atinkut, H. B. (2022). Impact of forest decentralization on sustainable forest management and livelihoods in East Africa. *Trees, Forests and People*, 10(November), 100346. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100346>
- Ullah, A., Zeb, A., Saqib, S. E., dan H. K. (2022). Landscape c0-Management and Livelihood Sustainability: Lessons Learned from the Billion Trees Afforestation Project in Pakistan. *Land Use Policy*, 115(6). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106034>
- Valujeva, K., Freed, E. K., Nipers, A., Jauhiainen, J., & Schulte, R. P. O. (2023). Pathways for governance opportunities: Social network analysis to create targeted and effective policies for agricultural and environmental development. *Journal of Environmental Management*, 325, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116563>
- Widhianthini, Dharmawan, A. H., & Azam Achsani, N. (2016). Keterlibatan Para Aktor Dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14403>
- Yahman, Y., & Setyagama, A. (2022). Government policy in regulating the environment for development of sustainable environment in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02591-1>